



INSTRUKSI PRESIDEN R.I.No.12/1982
tentang
PENDIDIKAN POLITIK
bagi
GENERASI MUDA

XI.116

Direktorat
Budayaan

98

KANTOR MENTERI MUDA URUSAN PEMUDA
DEPARTEMEN PENDIDIKAN & KEBUDAYAAN R.I
1982

340.590
INS

INSTRUKSI PRESIDEN R.I.No:12/1982
tentang
PENDIDIKAN POLITIK
bagi
GENERASI MUDA

Diterbitkan oleh
Kantor Menteri Muda Urusan Pemuda
Departemen Pendidikan & Kebudayaan R.I.

Cetakan Pertama, Oktober 1982
MPP/05-10/PPGM/82.

Dicetak oleh: P.T. Garuda Metropolitan Press.

**INSTRUKSI PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 12 TAHUN 1982
TENTANG
PENDIDIKAN POLITIK BAGI GENERASI MUDA
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,**

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka pelestarian Pancasila dan Undang Undang Dasar 1945 perlu terus menerus dipupuk rasa persatuan dan kesatuan bangsa demi kelangsungan hidup bernegara dan kenegaraan;
- b. bahwa sehubungan dengan hal tersebut pada huruf a di atas, kepada generasi muda sebagai penerus cita-cita bangsa Indonesia perlu diberikan pendidikan politik, untuk mengetahui norma, nilai, tata cara, dan aturan dalam kehidupan politik bangsa;
- c. bahwa untuk itu perlu mengeluarkan Instruksi Presiden tentang Pendidikan Politik bagi Generasi Muda;
- Mengingat** : 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945;
2. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Nomor IV/MPR/1978 tentang Garis-garis Besar Haluan Negara;
3. Keputusan Presiden Nomor 13 Tahun 1978 tentang Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi, dan Tata Kerja Menteri Muda serta Susunan Organisasi Staf Menteri Muda;
4. Keputusan Presiden Nomor 59/M Tahun 1978 tentang Pembentukan Kabinet Pembangunan III;
5. Keputusan Presiden Nomor 70/M Tahun 1978 tentang Pengangkatan Menteri Muda;
6. Keputusan Presiden Nomor 23 Tahun 1979 tentang Badan Koordinasi Penyelenggaraan Pembinaan dan Pengembangan Generasi Muda;

MENGINSTRUKSIKAN:

- Kepada** : Badan Koordinasi Penyelenggaraan Pembinaan dan Pengembangan Generasi Muda.
- Untuk:**
- PERTAMA** : Menggunakan Pola Pembinaan dan Pengembangan Pendidikan Politik Generasi Muda sebagaimana tersebut dalam Lampiran Instruksi Presiden ini sebagai bahan pedoman dalam pelaksanaan tugas pembinaan dan pengembangan generasi muda, khususnya sebagai bahan pendidikan politik.
- KEDUA** : Dalam melaksanakan ketentuan tersebut pada diktum **PERTAMA** supaya mengadakan koordinasi sebaik-baiknya dengan departemen-departemen/instansi-instansi yang bersangkutan.
- KETIGA** : Instruksi Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan agar dilaksanakan dengan sebaik-baiknya serta penuh tanggung jawab.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 11 Agustus 1982
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd

S O E H A R T O

**LAMPIRAN
INSTRUKSI PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 12 TAHUN 1982
TANGGAL 11 AGUSTUS 1982**

**POLA PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN
PENDIDIKAN POLITIK
GENERASI MUDA**

BAB I

PENDAHULUAN

A. U M U M

Suatu bangsa yang merdeka, yang ingin maju dan berkembang serta terjamin hidupnya, haruslah memiliki keyakinan terhadap nilai kebenaran yang dianutnya, baik sebagai bangsa maupun pribadi, dan yang menjadi pedoman bagi kehidupan dan penghidupannya baik pada masa sekarang maupun pada masa yang akan datang. Keyakinan itu menjadi pandangan hidup bangsa yang bersangkutan.

Bagi bangsa Indonesia, keyakinan akan nilai kebenaran seperti itu pada hakikatnya telah tersurat dan tersirat dalam pokok-pokok pikiran yang tertuang dalam Pembukaan UUD '45, yang memberikan tuntunan sekaligus kesadaran atau pandangan tentang bagaimana bangsa Indonesia seharusnya menempuh atau menyelenggarakan kehidupan berbangsa dan bernegara serta tujuan apa yang hendak dicapai dalam hidupnya.

Pokok-pokok pikiran bangsa inilah yang kemudian melandasi kemerdekaan bangsa Indonesia yang diproklamasikan pada tanggal 17 Agustus 1945 dan atas dasar kesepakatan nasional pada tanggal 18 Agustus 1945 diterima oleh bangsa Indonesia sebagai satu-satunya pandangan hidup, yang dirumuskan sebagai Pancasila. Hal itu berarti bahwa Pancasila, yang penjabarannya terurai dalam dasar negara, yaitu UUD '45, secara resmi menjadi sumber hukum dan moral yang mengikat seluruh rakyat Indonesia tanpa kecuali, dan oleh karena itu, harus dijunjung tinggi oleh bangsa Indonesia dalam kehidupan berbangsa dan bernegaranya.

Nilai-nilai yang tertuang dalam Pancasila, yang tidak lain merupakan tuangan hati nurani dan sifat khas karakteristik bangsa, secara hakiki tidaklah lahir pada saat tercapainya kemerdekaan, tetapi ia telah tumbuh dan berkembang melalui proses sejarah yang panjang. Ia berasal dari kodrat budaya dan telah menjadi milik seluruh rakyat, sebagaimana tercermin dalam watak dan kepribadian serta sikap dan tingkah laku bangsa Indonesia. Oleh karena itu, nilai-nilai Pancasila pada hakikatnya harus tetap terpelihara dan dibina secara nyata dan harmonis, dari generasi ke generasi, dalam arti bahwa setiap generasi pada setiap kurun waktu tetap berpegang teguh kepada Pancasila dan UUD '45 serta secara sadar mene-

rapkannya dalam segala aspek kehidupan bangsa atau pribadi sehingga, dengan demikian, akan tercapai usaha pembangunan manusia Indonesia seutuhnya dan seluruh masyarakat Indonesia.

B. PENGERTIAN DASAR.

Pada prinsipnya pendidikan politik bagi generasi muda merupakan rangkaian usaha untuk meningkatkan dan memantapkan kesadaran politik dan kenegaraan guna menunjang kelestarian Pancasila dan UUD '45 sebagai budaya politik bangsa. Pendidikan politik itu juga harus merupakan bagian proses pembaharuan kehidupan politik bangsa Indonesia yang sedang dilakukan dewasa ini dalam rangka usaha menciptakan suatu sistem politik yang benar-benar demokratis stabil, dinamis, efektif, dan efisien. Sebenarnya pendidikan politik itu secara alamiah telah berjalan dan tetap akan berlangsung terus melalui berbagai interaksi sosial dalam masyarakat yang dikenal sebagai proses penghayatan nilai. Melalui penghayatan itulah manusia belajar, mendalami, dan melatih diri serta meyakini bahwa nilai-nilai itu adalah nilai yang terbaik dan paling sesuai dengan kondisi objektif, alam pikiran dan perasaannya serta menurut hati nurani maupun penalarannya benar-benar merupakan bagian hidupnya. Namun, perlu ditekankan di sini bahwa meskipun proses penghayatan itu dapat berjalan dan berlangsung terus secara alamiah, dalam kenyataannya ia lebih berdaya guna dan berhasil guna jikalau dalam pertumbuhannya ditunjang oleh suatu usaha sadar dan berencana melalui baik pendidikan formal maupun pendidikan nonformal. Penghayatan nilai itu sendiri haruslah diarahkan kepada semakin mapannya kesadaran bangsa Indonesia dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, khususnya kehidupan politik.

Di sinilah letak peran pendidikan politik itu. Ia berfungsi untuk lebih memberi isi dan arah serta pengertian kepada proses penghayatan nilai yang sedang berlangsung. Dalam hubungan ini, jelas bahwa pendidikan politik yang dimaksud ditekankan kepada usaha mendapatkan pengertian tentang nilai yang etis normatif, yaitu dengan menanamkan nilai dan norma yang merupakan landasan dan motivasi bangsa Indonesia serta dasar untuk membina dan mengembangkan diri guna ikut serta berpartisipasi dalam kehidupan bangsa dan negara. Dalam kaitannya dengan masa depan, hal itu perlu dalam rangka menjawab tantangan, terutama di bidang

ilmu pengetahuan dan teknologi yang makin lama makin maju, dan kemajuan itu selain memiliki nilai positif juga mengandung aspek negatif. Selain itu, dengan pendidikan politik ini diharapkan bahwa bangsa Indonesia secara dini dapat dipersiapkan untuk dengan penuh ketangguhan menghadapi setiap ancaman yang bersumber dari berbagai ideologi politik yang tidak sesuai atau bertentangan dengan Pancasila dan UUD '45. Inilah yang menjadi dasar pemikiran tentang perlunya pendidikan politik karena tantangan dan ancaman yang dihadapi pada masa depan memerlukan jawaban yang tuntas, yang dipersiapkan melalui masa kini. Dalam pengertian ini, dapatlah disimpulkan bahwa pendidikan politik itu sangat penting bagi seluruh rakyat Indonesia, termasuk generasi mudanya, seperti telah diamanatkan oleh Ketetapan MPR No.IV/MPR/1978 tentang Garis-garis Besar Haluan Negara (GBHN).

Mengenai pengertian generasi muda itu sendiri, banyak sekali pandangan masyarakat, tergantung dari sudut mana masyarakat melihatnya. Namun, di dalam rangka pendidikan politik ini, generasi muda ialah bagian suatu generasi yang berusia 0-30 tahun meskipun pendidikan politik pada hakikatnya tidak dibatasi pada tingkat usia tertentu. Pada pihak lain, generasi muda sesuai dengan sifat-sifat khas yang dimilikinya, pada prinsipnya mempunyai fungsi-fungsi tertentu, terutama, yang berkaitan dengan perkembangan kelangsungan hidup bangsa. Ia berfungsi sebagai penerus, pengemban, dan pelestari nilai serta cita-cita bangsa. Dengan demikian, dapat dinyatakan bahwa setiap masalah yang sedang dihadapi oleh generasi muda pada hakikatnya adalah juga kepentingan seluruh bangsa. Oleh karena itu, adalah kewajiban dan tanggung jawab semua pihak untuk menanganinya. Dalam hubungan ini, perlu ditegaskan bahwa pendidikan politik bagi generasi muda merupakan bagian integral kerangka pendidikan politik nasional dan bagian yang tidak terpisahkan dari pendidikan nasional. Pendidikan politik ini juga merupakan bagian pembangunan nasional dan sebagai salah satu perwujudan usaha untuk menunjang tercapainya stabilitas nasional.

C. MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud diselenggarakannya pendidikan politik bagi generasi muda pada dasarnya ialah memberikan pedoman kepada generasi muda Indo-

nesia guna meningkatkan kesadaran kehidupan berbangsa dan bernegara, sejalan dengan arah dan cita-cita bangsa Indonesia.

Tujuan pendidikan politik ini ialah menciptakan generasi muda Indonesia yang sadar akan kehidupan berbangsa dan bernegara berdasarkan Pancasila dan UUD '45 sebagai salah satu usaha untuk membangun manusia Indonesia seutuhnya yang perwujudannya akan terlihat dalam perilaku hidup bermasyarakat sebagai berikut:

- a. Sadar akan hak dan kewajiban serta tanggung jawabnya sebagai warga negara terhadap kepentingan bangsa dan negara.
- b. Sadar dan taat pada hukum dan semua peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- c. Memiliki disiplin pribadi, sosial dan nasional.
- d. Memiliki tekad perjuangan untuk mencapai kehidupan yang lebih baik di masa depan yang disesuaikan dengan kemampuan objektif bangsa saat ini.
- e. Mendukung sistem kehidupan nasional yang demokratis sesuai dengan UUD '45 dan Pancasila.
- f. Berpartisipasi secara aktif dan kreatif dalam kehidupan berbangsa dan bernegara khususnya dalam usaha pembangunan nasional.
- g. Aktif menggalang persatuan dan kesatuan bangsa dengan kesadaran akan keaneka-ragaman bangsa.
- h. Sadar akan perlu pemeliharaan lingkungan hidup dan alam sekitar secara selaras, serasi dan seimbang.
- i. Mampu melakukan penilaian terhadap gagasan, nilai, serta ancaman yang bersumber dari ideologi lain di luar Pancasila dan UUD '45, atas dasar pola pikir atau penalaran logis mengenai Pancasila dan UUD '45.

D. PERLUNYA PENDIDIKAN POLITIK

Pendidikan Politik pada dasarnya berlangsung secara alamiah dalam suatu masyarakat yang lazim dilakukan oleh organisasi sosial politik, keluarga atau pribadi. Pendidikan Politik seperti itu sudah tentu akan berkembang secara sendiri-sendiri, sebab bersumber pada berbagai aspirasi politik yang berbeda, yang mungkin juga saling bertentangan, dan akhirnya akan membahayakan kesatuan dan persatuan bangsa. Oleh karena itu, perlu diadakan pendidikan politik yang dilaksanakan secara sadar, sis-

tematis dan terencana bersumber pada pandangan hidup bangsa Indonesia yaitu Pancasila yang telah menjadi ideologi negara bangsa kita. Secara demikian pendidikan politik akan menjadi sarana penunjang terpeliharanya stabilitas nasional, guna memperlancar usaha pencapaian cita-cita bangsa melalui pembangunan.

Pendidikan politik yang dilaksanakan secara sadar, sistematis, dan terencana ini menjadi lebih penting lagi artinya, bila dikaitkan dengan berbagai fakta sejarah bangsa kita dimasa lalu. Bangsa Indonesia telah mengalami berbagai macam pengalaman pahit dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, sejak proklamasi 17 Agustus 1945.

Tumbuhnya banyak organisasi politik beserta organisasi massanya, yang memiliki orientasi politik di luar Pancasila dan UUD '45 telah menyebabkan bangsa Indonesia hidup terkotak-kotak baik secara psikis atau pun secara fisik. Akibatnya terjadilah pertentangan politik satu sama lain, yang membawa kemerosotan dalam berbagai segi kehidupan bangsa. Situasi tersebut dimanfaatkan oleh berbagai golongan politik, terutama golongan yang orientasi politiknya secara nyata berada di luar Pancasila dan UUD '45. Mereka melakukan gerakan-gerakan fisik untuk mempengaruhi ataupun kalau dapat merebut kekuasaan yang sah. Gerakan-gerakan itu antara lain: gerakan theokrasi ekstrem oleh DI, TII; gerakan Separatis oleh RMS; gerakan yang memakai ideologi komunis oleh PKI melalui peristiwa Madiun dan G-30-S/PKI-nya; pemberontakan PRRI, Permesta, serta berbagai macam gerakan lainnya di seluruh wilayah tanah air.

Pertentangan yang berlatar belakang politik ini, tidak hanya terjadi di dalam masyarakat saja, tetapi juga di lingkungan penyelenggara negara, yang terjadi di antara orang-orang dari golongan politik tertentu yang berhasil memperoleh kesempatan untuk duduk dalam lembaga tertinggi negara. Mereka selalu menggunakan kekuasaannya untuk menyalurkan aspirasi politik golongannya. Sebagai contoh, misalnya golongan yang memperkenalkan sistem pemerintahan liberal kapitalistik melalui pembentukan kabinet parlementer. Semua itu menciptakan ketidak pastian dalam kehidupan nasional.

Pemerintahan Orde Baru di bawah kepemimpinan Presiden Suharto sejak awal telah melakukan gerakan koreksi dan pembaharuan di segala bidang kehidupan bangsa, dengan maksud menempatkan kembali Pan-

casila dan UUD '45 pada kedudukan terhormatnya sebagai pandangan hidup bangsa dan dasar negara, serta bertekad untuk melaksanakan secara murni dan konsekuen.

Di bidang politik, pemerintahan Orde Baru telah melakukan penataan kembali sistem politik nasional, baik yang bersifat supra struktur ataupun infra-struktur, termasuk di dalamnya pembenahan kembali struktur organisasi kekuatan sosial politik beserta kultur dan prosesnya. Penataan kembali, juga dilakukan di bidang ekonomi, sosial, budaya, dan pertahanan keamanan, serta politik luar negeri. Seiring dengan itu pemerintahan Orde Baru juga memperkenalkan pula pendekatan pembangunan nasional sebagai kebijakan, arah, dan strategi untuk mencapai cita-cita bangsa: yang dilaksanakan secara berencana, bertahap, dan berkelanjutan melalui program Pembangunan Lima Tahun (PELITA) bersama dengan akselerasi 25 - 30 tahunnya. Keberhasilan pembangunan nasional sangat bergantung kepada partisipasi seluruh rakyat. Karena itu seluruh rakyat Indonesia harus memiliki sikap mental, tekad, semangat, ketaatan, disiplin, dan kepercayaan terhadap diri sendiri, untuk ikut aktif dalam menyukseskan pembangunan nasional.

Pembangunan nasional bangsa Indonesia pada dasarnya bersifat terbuka, dan karena itu unsur dari luar mudah mempengaruhi perkembangan dinamika kehidupan bangsa Indonesia. Akibatnya terbuka pula kesempatan yang luas bagi generasi muda bangsa Indonesia untuk memperoleh informasi, ilmu pengetahuan, dan teknologi dari luar. Pengaruh yang positif pasti akan menguntungkan bangsa Indonesia dan membawanya ke arah kemajuan. Namun, pengaruh luar itu memiliki pula aspek negatif yang merugikan bangsa, baik dari segi mental dan pandangan hidup maupun dari segi sikap dan tingkah laku.

Pengaruh dari negara asing, misalnya, dapat dirasakan oleh generasi muda Indonesia yang pernah atau sedang berada di luar negeri, terutama di negara-negara yang menganut paham yang bertentangan dengan Pancasila dan UUD '45 atau di negara-negara tempat bermukimnya unsur separatis atau kelompok anti Negara Kesatuan Republik Indonesia baik yang berasal dari Indonesia maupun dari negara asing dan berusaha mempengaruhi atau melakukan kegiatan yang membahayakan kepentingan nasional.

Mengingat hal-hal itu, maka dirasakan perlunya menyelenggarakan

pendidikan politik khususnya bagi generasi muda Indonesia, baik di dalam maupun di luar negeri, agar generasi muda menjadi warga negara yang berdisiplin, berjiwa patriot, memiliki rasa nasionalisme dan idealisme serta penuh tanggung jawab sebagai bangsa.

E. RUANG LINGKUP

Pendidikan politik ini mencakup seluruh generasi muda Indonesia, baik yang berada di dalam maupun di luar negeri, di desa dan kota, dan berasal dari segala lapisan kelompok atau organisasi masyarakat. Pada dasarnya pendidikan politik generasi muda dititikberatkan kepada generasi muda yang berada diluar pendidikan formal. Namun, kegiatannya serasi dan saling menunjang dengan pendidikan politik melalui jalur formal.

Penegasan ini penting, karena dalam kenyataan generasi muda Indonesia menunjukkan tingkat keaneka-ragaman yang besar baik dari segi etnis, sosial psikologis, sosial ekonomis, sosial budaya maupun dari segi agama dan pandangan di bidang politik dalam melaksanakan demokrasi. Ini merupakan pencerminan keanekaragaman bangsa Indonesia sebagaimana dinyatakan GBHN dalam bagian tentang modal dasar dan faktor dominan. Dampak pendidikan politik bagi generasi muda ialah meningkatnya partisipasi generasi muda dalam perjuangan dan pembangunan nasional.

Pendidikan politik bagi generasi muda haruslah dilakukan sedini mungkin, mulai dari tingkat usia yang paling bawah dan penyelenggaraannya tidak dapat ditunda lagi.

F. LANDASAN POKOK

Landasan pokok yang dipergunakan dalam melaksanakan dan menyelenggarakan pendidikan politik bagi generasi muda ini ialah landasan yang pada prinsipnya telah mendasari kehidupan nasional bangsa Indonesia. Namun, selain itu, secara khusus dalam pendidikan politik ini landasan pokok yang umum itu disertai pula oleh landasan kesejarahan. Hal ini penting karena sesuai dengan sifat khasnya. Generasi muda memiliki jiwa, semangat dan tekad perjuangan, yang baik secara potensial maupun secara nyata memerlukan dasar untuk mewujudkannya, terutama

yang berkaitan dengan patriotisme, nasionalisme serta idealisme.
Landasan pokok itu ialah sebagai berikut ini:

- a. Landasan ideologi : Pancasila
- b. Landasan Konstitusional : UUD '45
- c. Landasan Operasional : GBHN.
- d. Landasan Historis : Sumpah Pemuda 28 Oktober 1928
Proklamasi 17 Agustus 1945.

BAB II

PERKEMBANGAN PENDIDIKAN POLITIK DAN SEJARAH NASIONAL INDONESIA

A. U M U M

Sejarah nasional Indonesia merupakan faktor yang sangat penting dalam pendidikan politik dan oleh karena itu ia menjadi salah satu bahan pokoknya. Pentingnya sejarah nasional Indonesia ini beralasan, sebab dengan mempelajari berbagai peristiwa sejarah, dapat dilihat secara jelas bagaimana pendidikan politik pada masa lalu itu berjalan atau dijalankan dan akibat apa yang ditimbulkan oleh bentuk pendidikan politik seperti itu. Dari sejarah pula dapat diketahui peranan apa yang telah dilakukan oleh generasi muda Indonesia dalam berbagai kurun waktu serta sejauh mana perjuangan yang telah dicapainya dalam rangka pengabdianya kepada kepentingan bangsa dan negara atau kehidupan pribadinya. Contoh dan keteladanan juga dapat diambil dari pengalaman sejarah untuk kemudian ditarik makna atau hikmatnya dan dihayati. Dengan demikian, dari penghayatan sejarah dalam pendidikan politik, generasi muda Indonesia akan tergugah untuk terus meningkatkan peranannya secara lebih baik dari masa ke masa.

Perkembangan pendidikan politik itu sendiri sebenarnya akan sangat dipengaruhi oleh pertumbuhan dan dinamika sejarah nasional Indonesia.

B. PENDIDIKAN POLITIK SEBELUM DAN SESUDAH KEMERDEKAAN.

Pemasyarakatan nilai politik kepada bangsa Indonesia secara sadar sebenarnya telah dilakukan jauh sebelum masa kemerdekaan, yang dijalankan oleh berbagai organisasi dan gerakan politik, baik di dalam maupun di luar negeri, terutama oleh generasi muda Indonesia guna memperoleh kembali hak politiknya yang dibelenggu oleh mekanisme penjajahan bangsa atas bangsa, memperjuangkan peningkatan kesadaran akan hakikat diri sebagai bangsa, memberi nilai terhadap nasib buruk bangsa yang terjajah, yang terwujud dalam kemiskinan dan keterbelakangan di segala bidang kehidupan. Usaha itu kemudian terbentuk secara alamiah menjadi sikap politik menentang penjajah yang ditunjang melalui peningkatan kemampuan berorganisasi di bidang politik.

Lahirnya pergerakan nasional yang memperjuangkan kepentingan sebagai bangsa dianggap oleh masyarakat tumbuh sejak terbentuknya Boedi Oetomo pada tanggal 20 Mei 1908 dan menjadi titik tolak proses pemasyarakatan nilai politik di Indonesia, yang kemudian dilanjutkan dan dikembangkan oleh berbagai organisasi dan gerakan politik lainnya, baik yang secara terang-terangan bersifat politis maupun melalui bidang ekonomi, sosial, budaya, dan agama seperti Syarikat Islam, Partai Nasional Indonesia, Perhimpunan Indonesia, Taman Siswa, Muhammadiyah, dan Kepanduan Kebangsaan dalam rangka perjuangan menentang penjajahan pemerintah kolonial Belanda atas bangsa Indonesia.

Organisasi dan gerakan politik itu dengan cara dan gayanya masing-masing secara sadar telah berusaha menanamkan rasa kesadaran kebangsaan, membinanya dan kemudian meningkatkan kadarnya dengan membangkitkan, menggelorakan, dan menghidup-hidupkan semangat nasionalisme dan idealisme yang dilatarbelakangi oleh patriotisme perjuangan yang etis. Usaha ini ternyata telah mencapai sasarannya dengan dikumandangkannya Sumpah Pemuda pada tanggal 28 Oktober 1928, yang merupakan perwujudan semakin bersatunya dengan bangsa Indonesia dalam perjuangan nasionalnya. Di sini nilai persatuan dan cita-cita untuk merdeka menjadi lebih menonjol dalam arti bahwa nilai politik yang telah dimasyarakatkan sebelumnya menjadi semakin berarti dan mendidik masyarakat akan haknya.

Pemasyarakatan nilai politik ini berjalan terus pada masa pendudukan militer Jepang yang menganut paham *fascisme* itu terhadap Indonesia, sekitar tahun 1942, yang telah menggantikan kekuasaan pemerintah kolonial Belanda, dengan tetap melaksanakan politik penjajahan terhadap bangsa Indonesia. Pemasyarakatan nilai politik ini bahkan semakin meningkat lagi selama Perang Dunia II. Sebagai akibat kekalahan Jepang dari Sekutu, terjadi kekosongan pemerintahan penjajahan di Indonesia yang telah memberikan peluang bagi bangsa Indonesia untuk mewujudkan tekadnya guna mencapai kemerdekaan nasional seperti dapat dilihat dari perjuangan fisik yang mengawali prosesnya.

Pada akhirnya pemasyarakatan nilai politik yang tidak lain adalah juga bentuk pendidikan politik tertentu pada masa sebelum kemerdekaan itu, yang telah berlangsung selama puluhan tahun, membuahkan hasil yang sangat berharga bagi bangsa Indonesia, yaitu dicapainya kemerdekaan

an nasional yang diproklamasikan pada tanggal 17 Agustus 1945 meskipun pencapaiannya memerlukan pengorbanan yang besar. Kebesaran bangsa Indonesia tidak hanya berupa keberhasilan usaha mencapai kemerdekaannya, tetapi juga karena bangsa Indonesia melalui para pemimpin perjuangan saat itu telah sanggup melihat jauh ke depan. Bersamaan dengan tercapainya kemerdekaan itu, bangsa Indonesia telah bertekad dan siap untuk menyelenggarakan suatu pemerintahan nasional dalam wadah negara kesatuan yang berbentuk republik tanpa ikatan apapun dengan negara lain. Juga berhasil mengusahakan kesepakatan nasional dalam menetapkan pandangan hidup dan dasar negara yang dirumuskan sebagai Pancasila dan UUD '45. Hal ini membuktikan betapa tingginya kesadaran politik bangsa Indonesia saat itu, yang selain meletakkan dasar atau sendi negara juga telah memperhitungkan secara matang jangkauan yang hendak dicapai pada masa datang. Kedewasaan politik ini pada hakekatnya adalah hasil pemasyarakatan nilai politik yang cukup lama. Dinamika dan perkembangannya sangat ditentukan oleh kualitas kesadaran berbangsa Indonesia akan hak, kewajiban, dan tanggung jawabnya terhadap kepentingan bangsa dan negara serta kemampuan dan ketangguhan dalam memberikan tanggapan terhadap setiap tantangan yang timbul pada setiap zaman dan kurun waktu tertentu.

Pemasyarakatan nilai politik pada masa sesudah kemerdekaan berlangsung dan berkembang terus sesuai dengan tantangan perjuangan yang tidak jauh berbeda dengan masa sebelumnya. Pemasyarakatan nilai politik berusaha menyadarkan masyarakat akan kepentingan politik bangsa sesuai dengan kedudukan baru sebagai warga negara bangsa yang merdeka. Pemasyarakatan nilai politik ini bermaksud mengarahkan dan mengalihkan semangat perjuangan kepada usaha mengisi kemerdekaan demi tercapainya kemajuan kehidupan nasional berdasarkan Pancasila dan UUD '45. Namun dalam perkembangan, pemasyarakatan nilai politik itu tidak berjalan seperti yang diharapkan. Timbul berbagai konflik politik dalam masyarakat dan kekisruhan penggunaan nilai Pancasila dan UUD '45 di lingkungan aparat pemerintahan, dapat dipandang sebagai suatu perkembangan kehidupan politik yang salah dan menyimpang dari cita-cita proklamasi.

Timbul dan berdirinya berbagai macam golongan politik beserta organisasi massanya, yang memiliki orientasi politik masing-masing ber-

pengaruh besar terhadap terjadinya konflik politik masa itu. Muncul gerakan-gerakan ekstrem tertentu, yang kadang-kadang menggunakan kekuatan fisik untuk memenangkan konflik. Karena itu setiap organisasi kekuatan politik selalu berusaha untuk menambah jumlah massa pendukungnya.

Sistem pemerintahan liberal parlementer memberi kesempatan yang luas kepada setiap golongan politik untuk melakukan kaderisasi sampai ke desa di seluruh wilayah tanah air. Pemasyarakatan nilai politik yang berjalan pada waktu itu lebih banyak ditujukan kepada usaha memperkuat keyakinan dan orientasi politik golongan masing-masing. Akibatnya terjadilah fanatisme sektoral dan oportunistik politik. Hal ini terlihat pada golongan politik yang ekstrem dan agresif seperti komunisme atau golongan agama, yang dikenal dengan sebutan ekstrem kiri dan ekstrem kanan. Barangkali tidak ada salahnya jikalau disebutkan bahwa pengaruh pola permainan politik tersebut di atas masih dirasakan sampai sekarang. Ini terbukti dengan adanya gerakan subversi, infiltrasi, ataupun penetrasi baik dari dalam maupun dari luar negeri.

Pola gerakan mereka pada hakekatnya masih dipengaruhi oleh kebiasaan menentang pemerintahan yang berkuasa seperti halnya dimasa penjajahan, dengan issue sentralnya berupa konflik laten yang diwarnai oleh sifat kedaerahan, agama, etnis, ataupun aliran politik tertentu. Kenyataan ini lebih kuat pengaruhnya, bila dibandingkan dengan kesadaran akan persatuan dan kesatuan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Konflik-konflik politik tersebut di atas mencapai titik klimaksnya, dengan terjadinya G-30-S/PKI tahun 1965 yang gagal itu.

C. PENDIDIKAN POLITIK DIMASA ORDE BARU.

Pemerintahan Orde Baru mengambil langkah dan tindak yang sifatnya reaktif dan korektif terhadap segala bentuk kesalahan dan penyimpangan yang telah dilakukan dimasa sebelumnya dalam semua bidang kehidupan termasuk bidang politik. Berbagai usaha penataan kembali, seluruh aspek kehidupan baik yang menyangkut masalah penyelenggaraan negara; sistem, struktur dan proses di bidang politik; ekonomi; sosial budaya; maupun Hankam telah dilakukan untuk diletakkan kembali pada kemurnian pelaksanaan Pancasila dan UUD '45.

Usaha-usaha itu antara lain terwujud dalam tindakan, membubarkan organisasi golongan politik komunis (PKI) dan larangan untuk menyebarkan ajarannya dalam bentuk apapun di seluruh wilayah tanah air, menyelenggarakan pemilihan umum, menyelenggarakan pembangunan nasional secara bertahap dan berkesinambungan, menyederhanakan organisasi kekuatan sosial politik melalui fusi partai-partai politik untuk selanjutnya menyederhanakan orientasi politik dari masing-masing kekuatan sosial politik yang ada. Selain itu pemerintahan Orde Baru telah pula melakukan perintisan ketertiban hukum dan konstitusi dengan menyelenggarakan sidang Majelis Permusyawaratan Rakyat guna menetapkan kebijaksanaan nasional dan kemudian menjabarkannya dalam berbagai peraturan perundang-undangan oleh Mandataris bersama dengan DPR.

Usaha lain yang tidak kalah penting, sebagai salah satu dari rangkaian penataan kehidupan politik ialah penyelenggaraan pendidikan politik melalui penataran Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila (P-4) guna meningkatkan kesadaran politik bangsa Indonesia dan membentuk pribadi politik yang aktif, positif dan kreatif dalam kehidupan berbangsa dan bernegara sehingga dapat berpartisipasi di dalam pelaksanaan Pembangunan nasional di segala bidang kehidupan. Dengan demikian, pendidikan politik itu merupakan sarana pembangunan politik bangsa. Manusia Indonesia menjadi subyek politik guna menunjang kemajuan, kestabilan dan dinamika pertumbuhan bangsa. Pendidikan Politik yang dilakukan sifatnya pertama-tama adalah etis, dalam arti menanamkan nilai Pancasila dan UUD '45 ke dalam jiwa dan sikap mental setiap manusia Indonesia, yang menyentuh hati nurani dan kemudian menumbuhkan semangat dan tekad yang terwujud dalam sikap, tingkah laku perbuatan, ungkapan, karya dan perjuangan politiknya. Di sini pemasyarakatan nilai politik semakin teratur dan terarah secara terpadu dan efektif serta diselenggarakan melalui usaha sadar dan berencana.

Melalui pendidikan politik kita berusaha untuk semakin mendekati cita-cita politik bangsa yang berdasarkan pada Pancasila dan UUD '45. Cita-cita politik bangsa ini harus dapat diuraikan secara jelas dalam sistem politik, struktur politik, mekanisme politik, budaya politik yang dikehendaki bersama oleh bangsa Indonesia, seperti yang tersimpul dalam ungkapan demokrasi Pancasila. Dengan demikian bangsa yang memiliki ideologi negara Pancasila, tidak akan begitu saja terjerumus, terseret dan dino-

dai ideologi lain.

Pada hakekatnya manusia Indonesia, sebagai pemilik Pancasila dan UUD '45, telah menjadi manusia Pancasila-lais, yang mempunyai sifat religius. Dalam kehidupan berbangsa dan bernegara manusia Indonesia tidak boleh meninggalkan kewajibannya terhadap hidup keagamaan dan berkepercayaan, yang diliputi oleh kesadaran akan dirinya sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa. Karena itu, setiap manusia Indonesia tidak boleh memakai hidup beragama dan berkepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha esa ini secara ekstrem ataupun sama sekali sekuler, melainkan selalu berada dalam keluwesan, keselarasan dan keseimbangan.

Dengan kata lain, manusia Indonesia baru dapat disebut sebagai manusia Pancasila-lais jikalau ia telah benar-benar melaksanakan nilai-nilai Pancasila dan UUD '45 dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Hal ini menjadi kewajiban azasi seluruh bangsa Indonesia agar cita-cita masyarakat adil dan makmur dapat tercapai, dan pembangunan Nasional sebagai kebijakan dan arah pencapaiannya dapat berjalan sebagai mana yang diharapkan, tanpa dihadapkan kepada kendala atau tantangan yang sebenarnya tidak perlu terjadi.

Kesemuanya itu akan sangat tergantung pada manusia Indonesia sendiri, sebagai titik pusat pelestarian Pancasila dan UUD '45. Pembangunan nasional yang utuh sangat bergantung kepada semangat para penyelenggara negara dalam mengetengahkan konsepsi strategisnya serta partisipasi aktif seluruh masyarakat dalam pelaksanaannya.

D. PERANAN GENERASI MUDA DALAM BERBAGAI KURUN WAKTU.

Pada dasarnya sejarah nasional Indonesia tidak lain merupakan pencerminan gambar sejarah perjuangan generasi muda pada masa lalu. Dalam berbagai kesempatan, generasi muda Indonesia telah menunjukkan kepeloporannya, yang dijiwai oleh semangat tidak kenal menyerah dan kediaan untuk berkorban, memberikan contoh dan keteladanan kepada bangsa tentang darma bakti yang patut dan seharusnya diberikan untuk membela kepentingan bangsa dan negara.

Generasi Muda Indonesia dalam berbagai peristiwa sejarah, sejak awal datangnya penjajah dan selama berlangsungnya masa penjajahan

sampai saat pencapaian kemerdekaan bangsa telah mengambil bagian besar dalam perjuangan politik dan kepahlawanannya. Pengalaman sejarah bangsa Indonesia sebelum kemerdekaan menunjukkan potensi yang besar dari generasi muda Indonesia dalam kepeloporan perjuangan. Kehendak untuk membebaskan diri dari penjajah saat itu telah menyentuh hati nurani generasi muda untuk berbuat lebih banyak bagi lingkungan masyarakatnya. Ia yang pertama-tama merasakan sentuhan itu, dan kehendak itu dianggap oleh generasi muda sebagai sesuatu yang langsung menyangkut kepentingannya dan oleh karena itu dijadikan landasan bagi perjuangannya.

Selanjutnya, dalam alam kemerdekaan berbagai perubahan yang mendasar telah muncul. Situasi, kondisi, dan tantangan yang dihadapi tidak hanya menyangkut bidang politik saja tetapi keseluruhan bidang kehidupan nasional sebagai akibat dari perjuangan untuk mengisi perjuangan. Hal ini telah menjadi kepentingan bersama seluruh bangsa, termasuk kepentingan dari generasi mudanya. Karena itu situasi dewasa ini telah menuntut kembali, kepeloporan yang pernah diberikan generasi muda pada masa lalu, untuk diwujudkan kembali demi tercapainya cita-cita bangsa yaitu masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan UUD '45.

E. KONDISI AWAL DAN TANTANGAN YANG DIHADAPI

Berbagai ancaman dan tantangan terhadap kehidupan bangsa perlu dihadapi oleh seluruh rakyat khususnya generasi muda yang akan meneruskan perjuangan bangsa. Subversi, infiltrasi, spionase, insurgensi baik dari luar maupun dari dalam negeri dapat menimbulkan perpecahan dan pertentangan di dalam masyarakat, terutama di kalangan generasi muda. Generasi muda seringkali menjadi sasaran. Usia yang muda menjadikannya lebih terbuka terhadap hal baru, memiliki keinginan berpetualang, ataupun keinginan untuk hidup bebas. Kemajuan di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi yang diamati dan dinikmati generasi muda juga dapat membawa pengaruh yang negatif.

kehilangan rasa patriotisme dan nasionalisme, serta timbulnya rasa rendah diri dapat terjadi. Juga frustrasi dapat timbul jikalau generasi muda tidak sanggup mengikuti perubahan-perubahan yang terjadi. Selain itu, pengaruh paham yang dianut oleh berbagai bangsa di dunia, yang bertentangan

dengan nilai Pancasila dan UUD '45 yang dimiliki bangsa Indonesia, cukup besar dan saling mendominasi, seperti kapitalisme dan liberalisme yang berdasarkan pada individualisme; komunisme yang berdasarkan pada kolektivisme; theokrasi ekstrem yang berselubungkan gerakan keagamaan, bersama dengan bentuk-bentuk barunya yang dewasa ini dikenal dengan nama gerakan kiri baru ataupun gerakan ekstrem kanan.

Perlu ditegaskan dalam hubungan ini bahwa, apabila dibandingkan dengan nilai Pancasila dan UUD '45 yang mengandung unsur keselarasan, keserasian dan keseimbangan (harmoni) paham-paham tersebut di atas ternyata memiliki kesejangan dan kerapuhan karena ada kontradiksi di dalamnya. Perlu diingat bahwa semua gerakan-gerakan tersebut di atas dikonstatasikan juga ada di Indonesia.

Sementara itu bersamaan dengan perkembangan paham-paham besar yang saling mendominasi tersebut di atas telah tumbuh pula generasi muda usia yang tidak memiliki pengalaman perjuangan, khususnya di bidang politik. Generasi Muda usia inilah yang memerlukan perhatian seluruh bangsa untuk dapat membina dan mengembangkan kemampuan mereka sesuai dengan sifat-sifat khasnya berdasarkan Pancasila dan UUD '45.

Bukan merupakan hal yang tidak mungkin bahwa generasi muda dengan tanpa melakukan penyaringan dalam hati nuraninya, akan secara terbuka menerima berbagai nilai dari luar yang dianggapnya sebagai bentuk dan dinamika kehidupannya, yang kemudian terkristalisasi secara padat dalam pola pikirnya. Akibatnya ia akan berjuang untuk membenarkan nilai yang berasal dari paham yang tidak sesuai dengan Pancasila dan UUD'45 itu, dan mengarahkan diri kepada kecenderungan untuk mengkhianati bangsanya sendiri.

Kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi yang mempengaruhi pola hubungan antar manusia, yang kadang-kadang mengesampingkan nilai kemanusiaan, khususnya di bidang penggunaan sumber daya manusia dan lingkungan hidupnya, baik yang menyangkut alam, masyarakat, maupun pribadinya, juga sangat berpengaruh terhadap perkembangan pertumbuhan generasi muda. Pengaruh itu berupa gejala perubahan pola hidupnya yang dikonstatasikan mengalami penurunan seperti menurunnya kedisiplinan, daya juang dan rasa kebangsaan, kepatuhan kepada hukum dan moral bangsa, dan agama, kepercayaan kepada diri sendiri dan bangsanya, penghargaan kepada lingkungan hidup keluarga, masyarakat, dan alam,

apabila dibandingkan dengan bobot positif yang seharusnya dipelihara. Hal ini dapat dikategorikan sebagai suatu pengkhianatan semu, yang contohnya ialah ketidak patuhan terhadap sistem pekerjaan, kurangnya semangat untuk berprestasi atau gangguan terhadap sistem keamanan dan ketertiban masyarakat.

Inilah yang patut dijawab oleh generasi muda Indonesia. Untuk itu perlu diusahakan peningkatan kegiatan dan partisipasinya dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, sekaligus melakukan penataan kembali yang menyeluruh dan terpadu guna lebih mewujudkan hak, kewajiban, dan tanggung jawabnya sebagai bangsa dan melanjutkan tugas sejarah yang dibebankan oleh bangsa dan negara melalui proses alih tugas antar generasi dengan tetap berdasarkan nilai Pancasila dan UUD '45. Hal ini menjadi kepentingan utama generasi muda agar peranan kepeloporan dapat terus lestari pada setiap kurun waktu.

Pembinaan serta pengembangannya menjadi tanggung jawab semua pihak karena generasi muda adalah calon pemimpin bangsa dan menjadi milik seluruh bangsa Indonesia apalagi jikalau dilihat kenyataan bahwa secara fisik generasi muda memiliki kekuatan dan berjumlah sekitar separoh lebih dari jumlah seluruh penduduk Indonesia.

Pendidikan politik berusaha meningkatkan kemampuan dan kesanggupan generasi muda agar lebih memahami dan menghayati nilai-nilai yang terkandung di dalam Pancasila dan UUD '45. Generasi muda sebagai salah satu subyek politik dalam kehidupan berbangsa dan bernegara yang memiliki kekuatan-kekuatan potensial, wajib mewujudnyatakan dalam pembangunan nasional sebagai suatu usaha mengamalkan Pancasila dan UUD '45. Wujud konkrit pengamalan tersebut berupa dukungan terhadap usaha pembangunan nasional, menjauhi sikap masa bodoh dan subyektif menghilangkan pola berpikir yang terkotak-kotak, serta menghilangkan sikap enggan ikut secara aktif dalam kehidupan berbangsa dan bernegara menuju kepada tumbuhnya kebanggaan nasional yang tersimpul dalam sikap ikut memiliki dan ikut bertanggung jawab terhadap kepentingan negara bangsa.

Angkatan pembangunan yang telah ada sejak Orde Baru bangkit yang memiliki tekad mempertahankan nilai-nilai Pancasila dan UUD '45 dari bahaya-bahaya yang mengancamnya harus terus berusaha untuk menciptakan dan membentuk kader-kader Pancasila dan UUD '45 yang sekaligus

menjadi kader pembangunan berlandaskan persatuan dan kesatuan bangsa. Citra generasi muda sebagai kader pembangunan, merupakan jawaban yang tepat bagi kesinambungan perjuangan generasi muda masa lalu, kini dan masa depan.

Pembentukan kader-kader Pancasila dan UUD'45 yang sekaligus kader pembangunan, merupakan usaha koreksi ke dalam diri bangsa Indonesia sendiri, tentang kesalahan atau penyimpangan yang pernah dilakukan oleh berbagai Kelompok masyarakat, golongan politik, serta pemimpin bangsa pada masa sesudah kemerdekaan, terutama sebelum meletusnya G-30-S/PKI. Dalam jangka waktu yang cukup lama dan melalui berbagai bentuk pemerintahan nasional, nilai Pancasila dan UUD '45 banyak dikesampingkan, guna mencapai kepentingan lain, yaitu kepentingan kelompok atau golongan politiknya.

Melalui pendidikan politik kita mengharapkan agar usaha yang telah dirintis oleh angkatan perjuangan seperti Angkatan 08, Angkatan 28, Angkatan 45 dan Angkatan 66 menuju kepada cita-cita bangsa itu akan lekas tercapai.

BAB III

FAKTOR YANG PERLU DIPERHATIKAN

A. U M U M

Pendidikan politik bagi generasi muda yang dilakukan sebagai usaha dasar, keberhasilannya pada dasarnya tidaklah didasarkan hanya kepada perhitungan jumlah manusia Indonesia yang telah mampu dicapai oleh program itu. Dalam hubungan ini, perlu diperhatikan berbagai hal yang saling berkaitan dalam pelaksanaan pendidikan politik ini secara nyata. Jumlah manusia yang berhasil dicapai hanyalah merupakan salah satu ukuran tentang kemanfaatan pendidikan politik yang dilakukan.

Meskipun faktor manusia merupakan hal yang sangat penting, ternyata diperlukan pula faktor lain yang akan menunjangnya, yang akan lebih menjamin pencapaian sasaran yang hendak dituju oleh pendidikan politik, yaitu bahwa kondisi objektif memegang peranan yang besar dalam pelaksanaan program ini. Apabila pendidikan politik dilakukan tanpa memperhitungkan segi objektivitas suatu kondisi, baik mengenai manusia maupun mengenai hal lain, maka hasilnya tidak akan memberikan kegunaan yang banyak dalam kehidupan bangsa dan negara, bahkan mungkin justru akan menimbulkan ketidakpastian sebab jaminan untuk dapat diterapkan kepada kenyataan kehidupan sesuai dengan lingkungan dan kondisi yang mempengaruhinya tidak ada sama sekali. Disamping itu, faktor penunjang lainnya yang juga memerlukan pemikiran ialah pentingnya diciptakan iklim tertentu di dalam kehidupan politik nasional yang sehat dan dinamis guna membantu pencapaian tujuan pendidikan politik ini secara tertib, yang menyangkut baik masyarakat maupun lembaganya yang pada hakikatnya berintikan kebutuhan akan keterbukaan dalam pembinaan dan pengembangannya. Dengan kata lain, hasil pendidikan politik ini harus dapat tertampung dalam dinamika kehidupan politik bangsa. Inilah pula sebenarnya yang dapat dinyatakan sebagai tujuan pendidikan politik. Partisipasi yang semakin besar dari masyarakat sudah tentu akan mempengaruhi kondisi kehidupan nasional yang berkembang serta mengajak bangsa untuk menyesuaikan diri kearah kemajuan. Dalam hubungan dengan sistem penyelenggaraan negara, diperlukan berbagai usaha yang sepatutnya diperhitungkan guna menunjang kehidupan berbangsa

dan bernegara berdasarkan Pancasila dan UUD '45.

Disamping faktor di atas, yang akan lebih memberi bobot kepada keberhasilan pendidikan politik ini, terdapat faktor lain yang akan mempengaruhi perkembangan dan pelaksanaan pendidikan politik bagi generasi muda ini. Faktor itu terutama bersifat lebih teknis, antara lain dalam menentukan pemasyarakatan pendidikan politik. Namun, meskipun sifatnya demikian, faktor yang mempengaruhi pendidikan politik ini, secara hakiki membutuhkan perhatian yang seksama pula.

B. FAKTOR PENUNJANG

Faktor penunjang ini terutama berasal dari kondisi objektif bangsa Indonesia, yang dalam pelaksanaan pendidikan politik ini patut memperoleh perhatian. Adapun faktor itu adalah sebagai berikut.

1. Keanekaragaman bangsa Indonesia, baik etnis, budaya maupun agama, disamping kenyataan lain, yaitu kondisi geografis wilayah Indonesia yang terdiri dari ribuan pulau yang besar dan kecil. Dari kenyataan ini dapat dikatakan bahwa sebenarnya bangsa Indonesia ini mempunyai potensi untuk tidak bersatu, jikalau keanekaragaman bangsa dijadikan dasar untuk itu. Namun, jikalau keanekaragaman itu dilandasi oleh semangat dan tekad bersatu dengan mengusahakan terbinanya persatuan dan kesatuan bangsa berdasarkan asas Bhinneka Tunggal Ika, maka ia akan menjadi faktor dinamis yang mendorong ke arah kemajuan bangsa dan memperkuat ketahanan nasional.
2. Tingkat ilmu pengetahuan dan teknologi serta taraf ekonomi bangsa yang masih berada dalam taraf perkembangan apabila dibandingkan dengan negara maju lain. Keadaan seperti ini mengharuskan bangsa Indonesia memiliki keterbukaan terhadap perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan berusaha mengembangkan potensi ekonominya untuk kesejahteraan bangsa melalui pertumbuhan ekonomi yang dinamis.
3. Meluasnya jaringan perhubungan dunia dewasa ini, yang mengharuskan bangsa Indonesia selalu berada di dalam segala bidang perkembangan dunia. Hal ini menjadi lebih penting lagi karena letak wilayah Indonesia yang mempunyai aspek geopolitik dan geostrategi dalam hu-

bungan antarbangsa. Keadaan ini mengharuskan bangsa Indonesia dapat dan mampu memberikan tanggapan secara tangguh dan tepat terhadap setiap tantangan yang datang dari luar di segala bidang kehidupan nasional. Disamping itu, bangsa Indonesia harus mampu pula memanfaatkan interaksi internasional untuk kepentingan perkembangan bangsa dan berusaha mempertahankan kedudukannya sebagai bangsa yang sejajar dan sederajat dengan bangsa lain dengan lebih memantapkan ketahanan nasional. Bangsa Indonesia juga harus berperan di dalam memelihara ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian, dan keadilan sosial.

Jelaslah, dengan demikian, bahwa pendidikan politik yang memperhatikan kondisi objektif bangsa akan memberikan manfaat yang tidak sedikit dalam membangun kehidupan bangsa Indonesia yang lebih baik di segala bidang kehidupan nasional baik sebagai bangsa maupun dalam hubungan antarbangsa. Ia juga dapat menunjang terpeliharanya kestabilan nasional dan laju pembangunan yang sedang dilaksanakan oleh bangsa Indonesia.

Disamping kondisi objektif bangsa Indonesia, maka guna menunjang keberhasilan pendidikan politik bagi generasi muda, perlu diperhatikan hal yang berkaitan dengan kelanjutan perkembangan pendidikan politik ini, yaitu bahwa pendidikan politik, yang pada hakikatnya juga mencerminkan usaha pembangunan politik, akan menciptakan kehidupan politik yang makin maju.

Kemajuan pendidikan politik dapat dilihat dari dua segi, yaitu segi peningkatan kesadaran politik masyarakat, khususnya generasi muda, dan segi peningkatan partisipasi politik, yang merupakan hasil kesadaran politik yang tinggi dari masyarakat itu. Partisipasi politik yang meningkat mempunyai aspek yang positif berupa makin meningkatnya dukungan pada penyelenggaraan pemerintahan. Namun, ia juga menimbulkan dorongan tuntutan terhadap penyelenggaraan kekuasaan negara. Jikalau dukungan politik lebih banyak daripada tuntutan yang ada, maka penyelenggaraan ini akan semakin mantap.

Selanjutnya, peningkatan partisipasi politik, baik dalam jumlah maupun dalam bentuknya yang mendukung jalannya kehidupan dan pembangunan negara, dapat menjadi tolok ukur keberhasilan pendidikan politik ini. Beberapa ukuran dapat disebut, antara lain berupa keikutsertaan

dalam Pemilihan umum secara sadar, komunikasi dengan pejabat, kunjungan ke DPR, keikutsertaan dalam organisasi, kegotongroyongan. Partisipasi politik yang demikian perlu mendapat perlindungan hukum berupa penegasan tentang kepastian penegakan hukum yang berlaku dan juga wadah untuk menyalurkan kehendak politik, karena jika tidak, dapat terjadi keresahan dalam masyarakat sebagai akibat tidak tertampungnya partisipasi politik ini.

C. FAKTOR YANG PERLU DIKEMBANGKAN.

Untuk menunjang keberhasilan program pendidikan politik ini, perlu dikembangkan secara terus-menerus faktor-faktor berikut ini:

1. Sikap keterbukaan dalam politik antara Pemerintah dan masyarakat.
2. Pengembangan lembaga politik dan pemerintahan.
3. Institusionalisasi lembaga politik dan pemerintahan dalam rangka menampung dan mewujudkan kehendak masyarakat.
4. Keterbukaan masyarakat terhadap gerak sosial ekonomi vertikal dan horizontal.
5. Keteladanan para pemuka masyarakat dan kepemimpinan nasional.
6. Perasaan ikut memiliki program pendidikan ini pada generasi muda.

Jikalau usaha-usaha itu dipenuhi, maka jelas ia akan merupakan faktor penunjang penting bagi keberhasilan program pendidikan politik ini.

Pendidikan politik di Indonesia hendaknya dilakukan dengan memperhatikan kondisi sosial politik masyarakat, yaitu masih adanya aspirasi kedaerahan yang menjurus kepada separatisme, adanya aspirasi untuk menegakkan dasar yang lain daripada Pancasila, masih lebarnya jurang antara minoritas kecil yang kaya dan mayoritas besar yang miskin, dan adanya perbedaan kota dan desa.

Pendidikan politik hendaknya diberikan secara bertahap dan dimulai dengan kelompok kader pimpinan dalam organisasi pemuda/pelajar.

Pendidikan politik diberikan dalam bentuk-bentuk yang terbatas dari segi waktu, tempat, serta jumlah pesertanya sehingga hasilnya dapat dievaluasi dan diamati. Pendidikan politik diberikan oleh manusia yang bertanggungjawab dan memiliki kemampuan yang diperlukan. Disamping itu, pendidikan politik dapat dilakukan melalui media massa yang disesuaikan dengan kebutuhannya.

BAB IV

BAHAN PENDIDIKAN POLITIK

A. U M U M

Bahan pendidikan politik generasi muda mencakup pembentukan watak dan kepribadian serta penanaman kesadaran dan pengetahuan tentang nilai, sikap, tingkah laku, keterampilan, dan motivasi yang hendak diproses alihkan sesuai dengan Pancasila dan UUD '45 untuk kemudian dibina dan dikembangkan. Oleh karena itu, pendidikan politik juga merupakan penjabaran P-4 lebih lanjut untuk generasi muda.

Bahan pendidikan politik bersumber dari dan berdasarkan pandangan hidup dan dasar negara Pancasila dan UUD '45 serta makna atau hikmat yang dapat dipetik dari perjuangan bangsa Indonesia. Disamping itu, diperlukan juga pengetahuan, sikap, dan keterampilan yang akan menambah kemampuan generasi muda Indonesia untuk berkembang dalam dunia yang semakin kompleks. Dengan pendidikan semacam itu, generasi muda diharapkan akan terdorong untuk turut serta secara aktif dalam kehidupan berbangsa dan bernegara dan dalam kegiatan pembangunan yang akan membawa cita-cita bangsa Indonesia ke arah yang lebih baik, yaitu masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan UUD '45.

B. B A H A N

Bahan pendidikan politik meliputi hal-hal sebagai berikut.

I. Penanaman Kesadaran Berideologi, Berbangsa dan Bernegara.

1. Penghayatan dan Pengalaman Pancasila dan UUD '45

- 1) Pandangan Tuhan Yang Maha Esa, sebagai makhluk pribadi sekaligus makhluk sosial
- 2) Pancasila sebagai dasar negara, termasuk demokrasi Pancasila.
- 3) Paham keterpaduan, yang meliputi konsep negara persatuan Wawasan Nusantara, ketahanan nasional, dan Hankamrata
- 4) Pokok pikiran yang tercantum dalam Pembukaan UUD '45
- 5) Batang tubuh dan penjelasan UUD '45, peraturan mengenai

- hak, kewajiban, serta tanggung jawab warga negara
- 6) Garis-garis Besar Haluan Negara
 - 7) Pengenalan terhadap ideologi-ideologi lain di luar Pancasila (tujuan, cara perjuangan, implementasi dalam kenegaraan dan sebagainya) agar pelaksanaan Pancasila tidak terperosok ke dalam kekeliruan atau penyimpangan tanpa disadari
2. Nilai perjuangan bangsa: patriotisme, kesediaan berkorban, kepahlawanan, dan semangat tidak kenal menyerah.
 3. Pengetahuan tentang sejarah pergerakan nasional:
 - 1). Masa pra-kebangkitan Nasional
 - 2). Masa Kebangkitan Nasional:
 - a. Masa Penjajahan Belanda
 - b. Masa Pendudukan Jepang.
 - 3). Masa Kemerdekaan Nasional:
 - a. Masa sekitar Proklamasi
 - b. Masa Demokrasi Liberal
 - c. Masa Demokrasi Terpimpin
 - d. Masa Demokrasi Pancasila
 4. Pengetahuan tentang struktur pemerintah, politik, serta fungsi setiap unit, dan pengenalan pemimpin masyarakat
 - 1). Adat istiadat dan tradisi luhur serta kegiatan yang mempengaruhi kehidupan politik, antara lain kebiasaan bermusyawarah dan mufakat.
 - 2). Pengetahuan tentang politik luar negeri Indonesia dan wawasan yang saling mempengaruhi.

II. Kehidupan dan Kerukunan Hidup Beragama

1. Ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa.
2. Keyakinan dan pengamalan ajaran agama yang dianut sendiri dan menghormati agama lainnya.
3. Kerukunan hidup beragama
4. Kehidupan beragama di bumi Pancasila
5. Hubungan agama dengan pembangunan

III. Motivasi Berprestasi

1. Penumbuhan semangat berlomba untuk berprestasi seperti karya

ilmiah, seni, dan olah raga.

2. Kompetisi untuk bekerja dengan sebaik-baiknya dalam berproduksi, kebersihan lingkungan, dan sebagainya.

IV. Pengamalan Kesamaan Hak dan Kewajiban, Keadilan Sosial, dan Penghormatan atas Harkat dan martabat Manusia

1. Kemampuan mengungkapkan perasaan dan pendapat pribadi serta menghargai perasaan dan pendapat orang lain ,
2. Kesukarelaan membantu orang yang lemah badannya dan lemah ekonominya.
3. Keikutsertaan dalam bergotong royong seperti dalam penanggulangan bencana alam, kejahatan, dan penyakit masyarakat.
4. Keikutsertaan dalam kegiatan sosial lain seperti ke Palang Merah-
an; menyumbangkan darah, menolong orang dalam kecelakaan.

V. Pengembangan Kemampuan Politik dan Kemampuan Pribadi untuk Mewujudkan dan Keinginan Ikut Serta dalam Politik.

1. Penguasaan bahasa Indonesia secara benar dan baik
2. Penumbuhan kemampuan dan kebiasaan membaca
3. Kemampuan mengemukakan pendapat secara lisan dan tertulis
4. Kemampuan berdiskusi, berargumentasi, secara kekeluargaan
5. Ketrampilan untuk bekerja mencari perbaikan kehidupan.

VI. Disiplin Pribadi, Sosial, dan Nasional.

1. Kemampuan menyelesaikan pekerjaan secara tepat waktu
2. Kepatuhan kepada aturan dan hukum di lingkungan keluarga, per-
kumpulan permainan, organisasi, olahraga.
3. Kepatuhan kepada hukum dan undang-undang nasional
4. Menjaga kelestarian, dan keserasian alam, lingkungan hidup dan
pendudukan.
5. Menumbuhkan suasana kehidupan yang sehat, tertib, dan dinamis.

VII. Kepercayaan kepada Pemerintah

1. Penumbuhan kepercayaan bahwa kekuasaan pemerintahan diper-
lukan untuk keamanan, kestabilan, dinamika, serta keutuhan ne-
gara dan bangsa Indonesia

2. Penumbuhan kepercayaan akan perlunya keteraturan dan ketertiban dalam masyarakat, negara, dan bangsa Indonesia yang berkembang terus
3. Penumbuhan kepercayaan bahwa dengan mentaati hukum dan aturan pemerintah serta ikut membantu program pemerintah, seseorang akan dapat membantu meningkatkan kesejahteraan bersama
4. Menyadari hakikat hukum, program, dan tujuan usaha Pemerintah.

VII-

I. Kepercayaan kepada Pembangunan yang Berkesinambungan

1. Kepercayaan bahwa masyarakat perlu secara terus-menerus dan bertahap melakukan penyesuaian dalam kehidupan berbangsa dan bernegara untuk meningkatkan taraf hidup rakyat banyak
2. Kepercayaan manfaat ilmu pengetahuan dan teknologi untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat berbangsa dan bernegara
3. Pengetahuan tentang program pembangunan, baik nasional, regional maupun sektoral
4. Keikutsertaan dalam pembangunan yang sedang berjalan

Bahan pendidikan politik ini merupakan nilai, sikap, pengetahuan, keterampilan, dan motivasi yang seharusnya dimiliki oleh setiap manusia Indonesia agar dapat menjadi warga yang baik, walaupun mungkin tidak setiap manusia Indonesia memilikinya secara sempurna. Meskipun demikian, jikalau dasar ini setiap kali dan terus-menerus ditanamkan kepada generasi muda Indonesia, kita dapat mengharapkan tumbuhnya bangsa Indonesia yang lebih ideal, yang mampu bersikap dan bertindak laku sesuai dengan Pancasila dan UUD '45. Perlu diingat juga bahwa bahan pendidikan politik harus diberikan secara bertahap dan berkesinambungan sesuai dengan tingkat pertumbuhan intelektualitas kelompok umur dan latar belakang sosia-ekonomis manusia yang merupakan kelompok sasarannya.

BAB V PENDEKATAN

A. U M U M

Pendekatan yang dimaksud dalam pendidikan politik ini adalah usaha tentang bagaimana pendidikan politik ini dilaksanakan dengan sebaik-baiknya agar konsep dasar yang berisi pola pembinaan dan pengembangan generasi muda mengenai arah dan tujuan yang hendak dicapai dalam kehidupan berbangsa dan bernegara dapat diterima oleh semua pihak dan masyarakat luas serta dianggap sebagai milik dan kewajibannya, dan dengan itu juga bertanggung jawab dan aktif dalam mencapai keberhasilannya.

Sebagai suatu kepentingan bangsa, sudah tentu pendekatan yang dilakukan dalam pelaksanaan pendidikan politik ini didasarkan atas kondisi dan kemampuan objektif bangsa, khususnya generasi muda, serta gagasan yang ada dalam masyarakat, seperti asas yang dipergunakan, jalur atau kelompok sasaran, bentuk koordinasi, jangkauan pemasyarakatan yang hendak dicapai, metode dan pengorganisasiannya, serta tolok ukur untuk menilai keberhasilan pendidikan politik bagi generasi muda ini. Landasan yang dipergunakan tetap berada dalam rangka penyelenggaraan negara dan tidak merupakan kegiatan yang berdiri sendiri. Ia adalah bagian yang tidak terpisahkan dari kebijakan dan strategi nasional dalam memenuhi cita-cita serta kebutuhan bangsa dan negara.

B. LANDASAN PELAKSANAAN

Selain landasan pokok yang telah dikemukakan dalam Bab I, yang meliputi Pancasila, UUD '45, GBHN dan nilai kesejarahan perjuangan bangsa yang terkandung dalam Sumpah Pemuda dan Proklamasi Kemerdekaan, pada dasarnya pelaksanaan pendidikan politik bagi generasi muda ini dilandasi pula oleh berbagai Ketetapan MPR (S) yang berlaku. Pendidikan politik ini harus dapat menunjang amanat rakyat yang berkaitan dengan kepentingan itu dan umumnya keseluruhan kehendak bangsa yang telah ditetapkannya. Demikian pula dengan berbagai peraturan perundang-undangan yang telah ditentukan sebagai penjabaran lebih lanjut mengenai pandangan hidup dan dasar negara Pancasila, UUD '45 serta

Ketetapan MPR (S), baik yang berbentuk undang-undang maupun yang berbentuk lain sebagaimana dapat diketahui secara umum oleh masyarakat sebagai hukum positif bangsa Indonesia.

Secara khusus, dalam hubungan ini, dikemukakan peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar bagi penyelenggara negara untuk melaksanakan pendidikan politik ini, disamping kesempatan bagi masyarakat luas untuk menyelenggarakan pendidikan politik secara mandiri melalui berbagai bentuk kehidupan kemasyarakatan yang ada, sudah tentu dengan tetap berpedoman kepada segala kebijakan dan strategi nasional berdasarkan Pancasila dan UUD '45.

Adapun peraturan itu adalah sebagai berikut:

- a. KEPRES RI No. 44 Tahun 1974
- b. KEPRES RI No. 45 Tahun 1974
- c. KEPRES RI No. 12 Tahun 1978
- d. KEPRES RI No. 13 Tahun 1978
- e. KEPRES RI No. 59/M Tahun 1978
- f. KEPRES RI No. 70 Tahun 1978
- g. KEPRES RI No. 10 Tahun 1979
- h. KEPRES RI No. 23 Tahun 1979

C. ASAS PELAKSANAAN

1. Asas Umum

Pada dasarnya pelaksanaan pendidikan politik bagi generasi muda ini dilandaskan kepada asas yang sesuai dengan keadaan serta sifat khas bangsa Indonesia, khususnya generasi muda, yang dipadukan dengan dinamika perkembangan kehidupan nasional dan kemajuan yang telah dicapai sehingga sasaran yang dikehendaki dengan pendidikan politik ini akan tercapai secara berdaya guna dan berhasil guna serta dimanfaatkan secara tepat guna oleh masyarakat dan diwujudkan dalam tingkat partisipasi yang sebesar-besarnya. Indonesia telah berkembang sepanjang sejarah bangsa dan hidup atas dasar silih asih, silih asah, dan silih asuh, yang dijiwai oleh semangat *hing ngarso sung tulodo, hing madyo mangun karso, tut wuri handayani, serta lilo legowo*. Ia harus menembus hati nurani dan meningkatkan watak dan kepribadian bangsa.

2. **Asas Demokrasi**

Penyampaian bahan pendidikan politik bagi generasi muda ini dilakukan melalui jalan yang mendidik, mengajak, menampung, serta menyalurkan gagasan yang berkembang. Ia harus berciri demokrasi budaya Pancasila atas dasar komunikasi timbal balik yang penuh tanggung jawab dan musyawarah untuk mufakat dalam perbedaan pendapat yang dilakukan dengan sesadar-sadarnya sebagai bangsa.

3. **Asas Keterpaduan**

Pendidikan politik bagi generasi muda ini menunjang terbinanya persatuan dan kesatuan bangsa, menjamin stabilitas, kepemimpinan nasional berdasarkan Pancasila dan UUD '45 serta usaha pembangunan nasional. Dalam dinamikanya, pendidikan politik ini harus terpadu, selaras, serasi, dan seimbang dengan seluruh bidang kehidupan, kebijakan, serta strategi nasional sehingga suatu tata kehidupan nasional yang semakin maju dan bersatu akan dapat dicapai.

4. **Asas Manfaat**

Pendidikan politik bagi generasi muda diselenggarakan sedemikian rupa, baik dalam bahan maupun dalam caranya, sehingga hasil yang dicapai dapat dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya oleh masyarakat. Ia harus dapat meningkatkan kesadaran hidup berbangsa dan bernegara, kemampuan bangsa, dan pengembangan pribadi. Manfaat pendidikan politik baik yang langsung maupun yang tidak langsung harus dapat dirasakan dan dinikmati masyarakat dalam jangka pendek, menengah dan panjang, atau jikalau mungkin, selama hidupnya.

5. **Asas Bertahap, Berjenjang dan Berkelanjutan**

Penyelenggaraan pendidikan politik bagi generasi muda dilakukan melalui penahapan secara berjenjang, baik dari segi pertumbuhan alamiah manusia mulai dari usia muda maupun dari segi kehidupan masyarakat melalui organisasi yang ada atau golongan politik, mulai dari pimpinan sampai kepada para fungsionaris atau aktivis.

Demikian pula tingkat pengertian dan kemahiran yang diperlukan dalam pendidikan politik bagi generasi muda. Ia semata-mata harus didasarkan atas kemampuan objektif manusia. Disamping itu, pen-

didikan politik ini dilaksanakan secara terus-menerus dan harmonis, sebagai suatu proses pematangan manusia Indonesia seutuhnya dan seluruh masyarakat Indonesia yang makin maju dan berkembang.

6. Asas Aman

Hasil pendidikan politik bagi generasi muda menunjang pematapan kehidupan nasional dengan semakin tingginya kesadaran berbangsa dan bernegara dan terpeliharanya laju pembangunan nasional. Sebagai kondisi, ia harus dapat menciptakan ketahanan dan ketangguhan manusia Indonesia dan masyarakat secara keseluruhan terhadap setiap kendala dan tantangan yang dihadapi. Ia harus aman dari berbagai pengaruh negatif yang berasal dari dalam dan luar negeri.

D. PENDEKATAN PELAKSANAAN

Untuk melaksanakan pendidikan politik dalam masyarakat ditempuh dua pendekatan pokok sebagai berikut.

1. Pendekatan Pembinaan

Dalam pendekatan pembinaan, pendidikan politik diprakarsai oleh Pemerintah dan kepemimpinan sosial, sedangkan generasi muda adalah sasaran pembinaan. Pendekatan pembinaan ini terutama diterapkan kepada generasi muda yang berusia 0 -- 17 tahun.

2. Pendekatan Pengembangan

Dalam pendekatan pengembangan, pendidikan politik diprakarsai oleh jajaran generasi muda sendiri sebagai subjek. Peranan Pemerintah dan kepemimpinan sosial adalah menciptakan iklim yang menguntungkan bagi tercapainya sasaran pendidikan politik ini. Pendekatan pengembangan terutama diterapkan kepada generasi muda yang berusia 18 -- 30 tahun.

Dengan menentukan pendekatan ini jelaslah arah kerja program pendidikan politik ini.

E. JALUR PELAKSANAAN

Pada dasarnya pendidikan politik bagi generasi muda ini dilak-

sanakan melalui jalur pelaksanaan sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Pola Dasar Pembinaan dan Pengembangan Generasi Muda baik dalam cara maupun dalam sarannya. Jadi, semua pihak yang berkepentingan dapat memahami dan melaksanakan partisipasinya sesuai dengan tugas dan fungsinya di bidangnya masing-masing. Dalam hal ini, perlu diperhatikan bahwa cara pembinaan dan pengembangan pendidikan politik ini harus lebih bersifat membangun dan mengembangkan diri sendiri serta masyarakat, dengan mengingat berbagai faktor yang ada dalam kehidupan masyarakat luas.

Adapun jalur pembinaan dan pengembangan generasi muda yang akan digunakan dalam pendidikan politik ini dikelompokkan menjadi tiga sebagai berikut.

1. Kelompok Jalur Utama:

1) Jalur Keluarga

Pelaksana pembinaan dan pengembangan ialah orang tua dan anggota keluarga terdekat, yang merupakan lingkungan pertama dalam rangka pelaksanaan konsepsi pendidikan seumur hidup.

2) Jalur Generasi Muda

Berdasarkan ketentuan yang telah ditetapkan oleh GBHN, pembinaan dan pengembangan generasi muda dilakukan melalui organisasi pemuda yang ada dalam masyarakat, yang dalam hal ini dibagi dalam 3 jalur sebagai berikut.

a) Jalur SLTP dan SLTA melalui (Organisasi Siswa Intra Sekolah (OSIS)

b) Jalur Kampus/Perguruan Tinggi/Akademi melalui organisasi mahasiswa intrauniversiter, yaitu senat mahasiswa dan badan perwakilan mahasiswa pada tingkat fakultas serta badan koordinasi kemahasiswaan pada tingkat universitas/institut/sekolah tinggi.

c) Jalur Kepemudaan, yaitu:

(1). KNPI sebagai wadah komunikasi antara generasi muda,

(2). Pramuka,

(3). Organisasi mahasiswa ekstrauniversiter,

(4). Organisasi pemuda lainnya,

(5). Kelompok minat (olah raga, seni budaya, ilmiah, pecinta alam, kewisataan dan lain-lain),

- (6). Kelompok fungsional/profesional (kewiraswastaan, kewirausahaan, kewartawanan dan sebagainya).

2. Kelompok Jalur Penunjang:

1) Jalur Sekolah/Pra-Sekolah

Pelaksanaan pembinaan dan pengembangan dilakukan melalui guru dan pendidik dengan para pembantunya, sedangkan usaha peningkatannya diselenggarakan melalui organisasi orang tua murid, penilik, atau melalui kunjungan guru ke rumah orang tua murid dan sebagainya.

Khususnya bagi jalur pra-sekolah perlu dilakukan usaha peningkatan, penataan, dan pembakuan mutu pendidikan serta sarananya, dan sekaligus diadakan usaha penerangan serta penyuluhan kepada orang tua dan keluarga.

2) Jalur Masyarakat

Pelaksanaan pembinaan dan pengembangan dilakukan melalui lembaga seperti lembaga peribadatan, organisasi sosial kemasyarakatan, lembaga pers dan media massa lainnya, kursus, dan lembaga diskusi, serta melalui jalan yang tidak melembaga seperti pergaulan sehari-hari, tempat rekreasi, pariwisata, dan pelayanan umum.

3. Jalur Koordinasi

Pelaksanaan pembinaan dan pengembangan dilakukan melalui jalur Pemerintah, yang dalam pelaksanaannya berdasarkan ketentuan dalam GBHN diwujudkan sebagai berikut.

- 1) Sistem koordinasi tunggal melalui suatu badan yang dikenal sebagai Badan Koordinasi Penyelenggaraan Pembinaan dan Pengembangan Generasi Muda yang dibentuk berdasarkan KEPRES No.23 Tahun 1979. Dalam hal ini, berbagai departemen/instansi pemerintahan yang mempunyai program kepemudaan atau generasi muda duduk sebagai anggota agar dengan demikian secara lintas sektoral kebijakan pembinaan dan pengembangan generasi muda dapat terkoordinasi dengan terpadu. Badan ini dibentuk mulai dari tingkat Pusat sampai ke tingkat kecamatan.

- 2) Pelaksanaan operasional pembinaan dan pengembangan generasi muda melalui Satuan Pengendali Koordinasi.
- 3) Pelaksanaan pembinaan dan pengembangan generasi muda di luar negeri melalui Perwakilan Republik Indonesia di negara yang bersangkutan yang disesuaikan dengan struktur organisasi, situasi, serta kondisi setempat perwakilan yang bersangkutan. Mekanismenya dikoordinasikan dengan departemen yang bersangkutan.

F. METODE PELAKSANAAN

Dalam rangka memperoleh hasil yang diharapkan, pendidikan politik bagi generasi muda ini menggunakan proses pendekatan yang didasarkan atas sejumlah kaidah sebagai berikut

1. Bahan pengajaran bertitik tolak dari apa yang telah diketahui oleh masyarakat generasi muda dan bergerak secara bertahap ke arah bahan baru yang belum diketahui sehingga kelompok sasaran akan tetap merasa dan yakin bahwa ia mempunyai pegangan yang kuat. Selain itu, pelaksanaannya dimulai dari landasan pengetahuan yang sederhana dan konkret untuk kemudian bergerak ke arah yang lebih rumit dan abstrak. Perlu ditegaskan bahwa dalam pelaksanaan seperti ini, faktor usia dan tingkat pengetahuan kelompok sasaran juga turut diperhitungkan.
2. Pendekatan yang dipergunakan pada dasarnya diperuntukkan bagi seluruh generasi muda dengan memperhatikan pula para pemimpin atau tokoh masyarakat yang ada. Dengan itu diharapkan bahwa program ini dapat menumbuhkan kader kepemimpinan nasional sebab dalam kenyataannya pada yang bersangkutan pula terletak tanggung jawab untuk meneruskan bahan pendidikan politik ini kepada para anggota kelompok atau organisasinya. Pendekatan semacam ini membawa keuntungan, antara lain, bahwa dengan cara ini dapat dicapai kelompok atau organisasi yang sudah ada. Selanjutnya, keuntungan yang diperoleh ialah bahwa dengan mengikutsertakan pimpinan kelompok atau organisasinya yang ada sekaligus juga dapat dibangkitkan rasa tanggung jawab atas keberhasilan program ini serta partisipasi generasi mudanya.
3. Program pendidikan politik ini harus ditekankan kepada faktor integrasi bangsa dan tidak boleh menjadi suatu kegiatan khusus suatu

golongan saja. Selanjutnya, perlu dikemukakan bahwa penekanan terhadap kebersamaan tidaklah berarti bahwa yang menunjukkan keanekaragaman daerah tidak boleh dijadikan pokok pengajaran sebagai pengetahuan.

Perlu dikemukakan selanjutnya bahwa metode pelaksanaan ini akan diuraikan lebih lanjut secara lebih terperinci dalam petunjuk pelaksanaan dengan tetap berpegang kepada apa yang telah tercantum dalam Pola Pembinaan dan Pengembangan Pendidikan Politik Generasi Muda ini.

G. ORGANISASI PELAKSANAAN

Untuk lebih memperjelas pengorganisasian usaha pelaksanaan pendidikan politik bagi generasi muda ini, perlu dikemukakan dua hal sebagai berikut.

1. Prinsip Umum

Prinsip umum yang dipergunakan dalam melaksanakan pendidikan politik ini ialah prinsip keikutsertaan seluruh masyarakat dan segenap lembaga pemerintahan. Pendidikan politik ini hendaknya dilihat sebagai suatu pertanggungjawaban dan milik bersama dalam arti yang seluas-luasnya. Kemudian, perlu dijelaskan bahwa, meskipun program ini bersifat nasional, kemungkinan ke arah penyampaian dan sistem organisasi yang bervariasi tetap terbuka, yang disesuaikan dengan keadaan setempat berbagai kelompok sasaran.

2. Koordinasi

Yang diperlukan ialah koordinasi yang terarah dan teratur sehingga di antara sedemikian banyak kelompok atau organisasi yang aktif dalam pendidikan politik ini akan terdapat suatu kesatuan bahasa, gerak, langkah, dan tujuan, meskipun dalam kenyataannya terdapat, misalnya, berbagai variasi di dalam metode.

Koordinasi selamanya berpegang kepada KEPRES No.23 Tahun 1979 tentang Badan Koordinasi Penyelenggaraan Pembinaan dan Pengembangan Generasi Muda. Namun, pada pihak lain dirasakan perlu juga diusahakan suatu kerjasama yang terarah antara kegiatan di bidang pendidikan politik bagi generasi muda ini dengan badan-badan lainnya.

H. TOLOK UKUR

Berdasarkan peninjauan terhadap tujuan yang hendak dicapai dengan pendidikan politik bagi generasi muda ini, dapat dikemukakan penahapan kemajuan yang akan diperoleh sebagai berikut.

1. *Taraf pertama*, yang mencakup unsur:
 - 1) Pengetahuan,
 - 2) Pengertian,
 - 3) Pemahaman,
2. *Taraf Kedua*, yang memerlukan lebih banyak usaha dan waktu pematangan, yang mencakup unsur:
 - 1) Penerimaan,
 - 2) Penanggapan,
 - 3) Penghargaan,
 - 4) Penjiwaan.
3. *Taraf Ketiga*, jikalau kelompok sasaran bersikap dan bertingkah laku se bagaimana yang diharapkan, yang mencakup unsur:
 - 1) Pengalaman,
 - 2) Penerapan.

Perlu diingat dalam hal ini bahwa keberhasilan pendidikan politik bagi generasi muda ini hanyalah dapat dilihat dari perubahan sikap atau kemajuan generasi muda dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Kemajuan ini akan terlihat dengan jelas terutama dalam sikap yang mencerminkan kedewasaan politik, yang menunjukkan bahwa, generasi muda itu akan merasa dan yakin akan kedudukannya sebagai warga negara. Ia tidak saja mempunyai hak tetapi yang terutama juga mempunyai kewajiban dan tanggung jawab terhadap bangsa dan negara, dengan segala kepentingannya. Beberapa ukuran konkret telah disebut sebelumnya, yaitu keikutsertaan dalam Pemilu secara sadar, peningkatan komunikasi asosiatif antara masyarakat dengan para pejabat, keikutsertaan dalam organisasi sosial masyarakat, keikutsertaan masyarakat dalam usaha bersama (gotong royong) dan sebagainya,

Selanjutnya, perlu dipahami bahwa menentukan suatu tolok ukur yang objektif, langsung, dan tepat bagi keberhasilan pendidikan politik ini akan mencakup kurun waktu yang lama. Dengan demikian, tolok ukur ini hanya dapat diterapkan dengan usaha pengamatan terhadap keikutsertaan

masyarakat, yang meliputi jumlah generasi muda yang dapat dicapai oleh pendidikan politik ini dan kesediaan kelompok alamiah untuk juga ikut serta. Selain itu, yang juga penting ialah sambutan yang baik dari masyarakat pada umumnya terhadap pendidikan politik ini.

BAB VI **PENUTUP**

Pendidikan politik bagi generasi muda harus berkelanjutan dan dapat meningkatkan proses gerak pembangunan dalam mencapai tujuan nasional. Pendidikan ini bersifat antar generasi, dengan generasi yang lebih muda usia sebagai kader penerus pada titik kesinambungan.

Supaya pendidikan politik generasi muda ini berdaya guna dan berhasil guna, perlu diciptakan iklim yang sehat yang memungkinkan berkembangnya dinamika, kreativitas, dan semangat kepeloporan generasi muda yang diwujudkan dalam pengabdian terhadap bangsa dan negara serta partisipasi aktif dalam pembangunan nasional.

Agar tercapai kualitas generasi muda yang berpendidikan politik yang sesuai dengan cita-cita berdasarkan Pancasila dan UUD '45, perlu pendidikan politik bagi generasi muda ini diselenggarakan sedini mungkin, tidak dapat dan tidak perlu ditunda lagi karena proses alih generasi selalu berlangsung secara alamiah. Pada pihak lain kondisi objektif bangsa serta kondisi objektif bangsa-bangsa dalam pergaulan internasional sudah tidak memberikan kesempatan lagi untuk menunda segala hal-ihwal tentang kehidupan berbangsa dan bernegara. Pelaksanaan pendidikan politik itu sendiri, yang mencakup pendidikan politik bagi generasi muda, tidak dibatasi oleh waktu.

Pendidikan politik generasi muda membutuhkan partisipasi aktif segala pihak, terutama generasi muda itu sendiri, dan dilaksanakan atas dasar ketaqwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Dengan bimbingan-Nya, diharapkan hasilnya akan merupakan suatu sumbangan yang terbesar dari generasi muda Indonesia dalam memberikan darma baktinya kepada usaha melestarikan kelangsungan hidup bangsa dan negara Indonesia.

Jakarta, 12 April 1982



13647

XI.

Perpustakaan
Jenderal

3